

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab tinjauan pustaka yang berisikan mengenai tinjauan permukiman, permukiman kumuh, karakteristik permukiman kumuh, kriteria permukiman kumuh dan arahan kebijakan dalam mengatasi permukiman kumuh. Selanjutnya pada bagian berikut akan dijabarkan secara lebih lanjut tentang studi literatur yang telah dilakukan.

2.1 Permukiman

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Rindarjono (2017) Settlement atau permukiman adalah kelompok satuan-satuan tempat tinggal atau kediaman manusia mencakup fasilitasnya seperti bangunan rumah serta jalur jalan, dan fasilitas lainnya yang digunakan sebagai sarana pelayanan manusia tersebut. Permukiman adalah suatu bentuk artificial maupun natural dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok, untuk bertempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya

Menurut Surtiani (2006), pertumbuhan permukiman dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1) Pertambahan Penduduk

Pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Secara manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Dengan demikian semakin bertambahlah jumlah hunian yang ada di kawasan permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman.

2) Urbanisasi

Urbanisasi yaitu adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus migrasi desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kaum urbanisasi

yang bekerja di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu saja memiliki untuk tinggal di permukiman di sekitar pusat kota. Hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Muta'ali, (2016) menyatakan kompleks permukaan yang secara fisik daerah kumuh, ditandai oleh bentuk rumah yang kecil dengan kondisi lingkungan yang buruk, pola settlement yang tidak teratur, kualitas lingkungan yang rendah, serta minimnya fasilitas umum.

Menurut Suharini (2007) permukiman kumuh diartikan sebagai sekelompok bangunan di suatu daerah dicirikan oleh kuburukan yang berlebihan, kondisi kurang sehat, kekurangan fasilitas akan menimbulkan bahaya kesehatan jasmani penduduk atau himpunnanya, dalam mana lahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut permukiman kumuh merupakan permukiman yang padat, tidak terawat, dan tidak teratur. Daerah tersebut menjadi kumuh karena kurang optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan manusia dan kualitas bangunan rendah.

2.2 Pemukiman Kumuh

2.2.1 Pengertian Pemukiman Kumuh

Pemukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya pemukiman berasal dari kata *housing* dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan dan kata *human settlement* yang artinya pemukiman. Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan menitik beratkan pada fisik atau benda mati, yaitu *houses* dan *land settlement*. Pemukiman memberikan kesan tentang pemukim atau

kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga

pemukiman menitikberatkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (*human*). Dengan demikian perumahan dan pemukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya, pada hakikatnya saling melengkapi, Kurniasih, (2007).

Kawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya Kurniasih (2007).

Menurut Sinulingga (2005) ciri kampung/pemukiman kumuh terdiri dari:

- a. Penduduk sangat padat antara 250-400 jiwa/ha. Pendapat para ahli perkotaan (MMUDP,90) menyatakan bahwa apabila kepadatan suatu kawasan telah mencapai 80 jiwa/ha maka timbul masalah akibat kepadatan ini, antara perumahan yang dibangun tidak mungkin lagi memiliki persyaratan fisiologis, psikologis dan Pelindungan terhadap penyakit.
- b. Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena sempitnya, kadang-kadang jalan ini sudah tersembunyi dibalik atap-atap rumah yang sudah bersinggungan satu sama lain.
- c. Fasilitas drainase sangat tidak memadai, dan malahan biasa terdapat jalan-jalan tanpa drainase, sehingga apabila hujan kawasan ini dengan mudah akan tergenang oleh air.
- d. Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim sekali. Ada diantaranya yang langsung membuang tinjanya ke saluran yang dekat dengan rumah, ataupun ada juga yang membuangnya ke sungai yang terdekat.
- e. Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan air sumur dangkal, air hujan atau membeli secara kalengan.
- f. Jadi menurut Sinulingga (2005) pemukiman kumuh adalah lingkungan hunian atau tempat tinggal/rumah beserta lingkungannya, yang

berfungsi sebagai rumah tinggal dan sebagai sarana pembinaan keluarga, tetapi tidak layak huni ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk, sarana dan prasarananya, fasilitas pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana sosial budaya masyarakat.

2.2.2 Penyebab Terjadinya Pemukiman Kumuh

Permukiman kumuh yang muncul salah satunya terjadi karena ketidakmerataan pembangunan dan ekonomi yang terpusat pada daerah perkotaan sehingga menyebabkan adanya migrasi dari desa ke kota. Ramadhan (2014) menyebutkan penyebab tingginya resistensi dari penghuni permukiman kumuh untuk tetap berada pada lokasi semula adalah jarak yang dekat antara permukiman dengan pusat-pusat lapangan kerja yang akan digeluti. Sebagian besar lokasi permukiman kumuh berada ditempat strategis pusat kota, dekat pergudangan, tepi sungai, belakang pertokoan, atau dipinggiran kota. Kondisi lingkungan di bawah standar dengan sarana dan prasaran yang kurang memadai tidak menjadi masalah bagi penghuninya, namun faktor penentu yang penting yaitu dekat dengan tempat kerja khususnya seperti pekerja pasar, bangunan, maupun buruh industri.

Penyebab munculnya permukiman kumuh (Sadyohutomo, 2008) adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan kota yang tinggi yang tidak diimbangi oleh tingkat pendapatan yang cukup
2. Keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana (terutama jalan) pada daerah perkembangan permukiman baru. Seiring dengan kebutuhan perumahan yang meningkat maka masyarakat secara swadaya memecah bidang tanah dan membangun permukiman tanpa didasari perencanaan tapak (*site plan*) yang memadai. Akibatnya bentuk dan tata letak kavling tanah menjadi tidak teratur dan tidak dilengkapi prasarana dasar permukiman.

Muta'ali (2016) mengatakan bahwa penyebab adanya permukiman kumuh dibatasi dalam hal faktor-faktor yang memicu perkembangan permukiman kumuh tersebut, yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, faktor jarak antara lokasi rumah dengan tempat kerja menempati prioritas utama. Faktor kejelasan status kepemilikan rumah menjadi kualitas kedua, sedangkan bentuk dan kualitas bangunan tetap menempati prioritas yang paling rendah.

2. Faktor Geografi

Faktor geografi dalam hal ini meliputi letak dan ketersediaan lahan. Lahan diperkotaan untuk perumahan semakin sulit diperoleh dan semakin mahal, hal ini tentu saja diluar keterjangkauan sebagian besar anggota masyarakat.

3. Faktor Psikologis

Kebutuhan kehidupan manusia tidak hanya sekedar kebutuhan fisik saja namun juga kebutuhan psikis seperti kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk aktualisasi diri, dan kasih sayang untuk sesama. Kebutuhan rasa aman bagi penghuni permukiman kumuh dinilai sangat penting, mereka betah tinggal dipermukiman kumuh karena merasa aman dan terlindungi.

Permukiman kumuh semakin berkembang terutama di wilayah padat penduduk, seperti pendapat Sunarti (2014). Permukiman kumuh berasosiasi dengan kualitas lingkungan permukiman buruk, ketidaknyamanan penduduk terhadap keamanan, dan kondisi sarana dan prasarana lingkungan tidak sesuai standar. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya penuaan bangunan dan pemadatan bangunan. Permukiman kumuh terjadi karena kebutuhan tempat tinggal dan sarana prasarana pendukung kehidupan manusia tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat serta terbatasnya lahan permukiman.

2.2.3 Kriteria Pemukiman Kumuh

Menurut Deliana (2015) permukiman kumuh dapat dilihat berdasarkan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi dan dapat dipastikan kondisi fisiknya tidak sesuai dengan standar rumah yang layak huni serta kondisi sosial ekonomi yang tidak mendukung. Dari kondisi fisik dapat dilihat bagaimana kualitas bangunannya, kepadatan bangunan, dan kondisi sarana dan prasarana permukiman. karakteristik permukiman kumuh mempunyai kondisi perumahan dengan kepadatan tinggi dan ukuran unit perumahan relatif kecil, atap rumah di daerah kumuh biasanya terbuat dari bahan yang sama dengan dinding. Karakteristik permukiman kumuh yang paling menonjol adalah kualitas bangunan rumahnya yang tidak permanen, dengan kerapatan bangunan yang tinggi dan tidak teratur, prasarana jalan yang sangat terbatas walaupun ada berupa gang-gang sempit yang berliku-liku, tidak adanya saluran drainase dan tempat penampungan sampah, sehingga terlihat kotor.

Pendapat dalam Suherlan (1996), mengemukakan beberapa karakteristik daerah kumuh, yaitu :

1. Permukiman tersebut dihuni oleh penduduk yang padat dan berjubel karena adanya pertumbuhan penduduk alamiah maupun migrasi yang tinggi dari pedesaan.
2. Perkampungan tersebut dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah atau memproduksi subsistem yang hidup di bawah garis kemiskinan.
3. Perumahan di permukaan tersebut berkualitas rendah atau masuk dalam kategori kondisi rumah darurat (*substandart housing conditions*), yaitu bangunan rumah yang terbuat dari bahan-bahan tradisional, seperti bambu, kayu, alang-alang, dan bahan sepat hancur lainnya.
4. Kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah, perkampungan miskin memang selalu ditandai oleh persebaran penyakit menular dan lingkungan fisik yang jorok.
5. Langkanya pelayanan kota (*urban service*) seperti air minum, fasilitas MCK, listrik, sistem pembuangan kotoran dan sampah, dan Pelindungan kebakaran.

6. Pertumbuhannya tidak terencana sehingga penampilan fisiknya tidak teratur dan terurus dalam hal bangunan, halaman, dan jalan-jalan, sempitnya ruang antar bangunan, terbuka sama sekali.
7. Penghuni permukiman miskin ini mempunyai gaya hidup pedesaan karena sebagian besar penghuninya merupakan migran dari pedesaan yang masih mempertahankan pola kehidupan tradisional, seperti hubungan-hubungan yang bersifat pribadi dan gotong royong.
8. Munculnya perilaku menyimpang seperti pencurian, pelacuran, kenakalan, perjudian dan kebiasaan minum-minuman keras sebagai ciri lainnya perkampungan miskin tersebut. Tetapi karena permukiman lapisan masyarakat lainnya juga terjadi pola-pola perilaku menyimpang tersebut, maka kurang tepat kiranya bila hal itu dijadikan sebagai ciri khas permukiman miskin.

Tingkat permukiman kumuh kota dapat diukur dengan variabel – variable yang menyebabkan kekumuhan. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2016) kriteria permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditinjau dari Kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana, yaitu:

- a. Kondisi bangunan
- b. Jalan lingkungan
- c. Penyediaan air minum
- d. Drainase lingkungan
- e. Pengelolaan air limbah
- f. Pengelolaan persampahan
- g. Proteksi kebakaran

Berdasarkan beberapa kriteria permukiman kumuh di atas, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kriteria permukiman kumuh menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena ini merupakan kriteria terbaru dan telah disahkan oleh pemerintah. Adapun kriteria menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (2016) ditinjau dari :

1. Bangunan gedung. Bangunan gedung merupakan bangunan rumah sebagai tempat tinggal bagi penghuninya. Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung yaitu:

a. Ketidakteraturan Bangunan

Ketidakteraturan bangunan merupakan bangunan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan Lingkungan, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona. Ketidakteraturan bangunan juga ditinjau dari ketidakmemenuhan ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL mengenai pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, dan wajah jalan.

b. Tingkat kepadatan bangunan

Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan keteraturan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang seperti Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maupun Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

c. Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat

Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat yaitu kondisi bangunan gedung permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Adapun persyaratan teknis yang dimaksud yaitu mengenai pengendalian dampak lingkungan, keselamatan bangunan gedung, kesehatan bangunan gedung, kenyamanan bangunan gedung, dan pembangunan bangunan gedung diatas atau dibawah tanah, air, mauoun sarana dan prasarana umum.

2. Jalan lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan yitu jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan permukiman, dan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk yaitu terjadi

kerusakan pada permukaan jalan sehingga mengganggu kenyamanan aksesibilitas lingkungan permukiman.

3. Penyediaan air minum

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum yaitu ketidakterediaan akses aman air minum yaitu kondisi dimana penduduk di lingkungan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi standar kesehatan, dan tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu dalam lingkungan permukiman yaitu 60 liter/hari.

4. Drainase lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan yaitu drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun, ketidakterediaan drainase baik saluran tersier maupun saluran lokal, drainase lokal tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan, drainase lingkungan permukiman tidak terpelihara dengan baik sehingga pada saluran drainase terjadi akumulasi limbah padat dan cair, konstruksi drainase lingkungan yang buruk yaitu berupa galian tanah tanpa material pelapis maupun konstruksi yang telah rusak

5. Air limbah

Kriteria pengelolaan ditinjau dari air limbah yaitu sistem dan sarana prasarana pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku yaitu tidak memiliki sistem yang memadai seperti kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual maupun komunal, tidak tersedianya sistem pengolahan air limbah setempat atau terpusat.

6. Pengelolaan persampahan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan yaitu prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis seperti tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga, tempat pengumpulan sampah dengan sistem 3R (reduce, reuse, recycle), gerobak atau truk sampah pada skala lingkungan, tempat pengolahan sampah terpadu pada skala lingkungan. Sistem pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis pada lingkungan permukiman yaitu pewadahan dan pemilahan domestik, pengumpulan lingkungan, pengangkutan lingkungan, dan pengolahan lingkungan. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah, maupun jaringan drainase.

7. Proteksi kebakaran

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran yaitu kondisi dimana ketidaktersediaan pasokan air yang diperoleh dari sumber alam dan buatan, jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran, sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadi kebakaran, data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan mudah diakses.

2.3 Air Bersih

Pemukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (UU No.1 tahun 2011).

Adapun menurut Ditjen Bangda Kemendagri, karakteristik permukiman kumuh antara lain : sebagian besar penduduknya berpenghasilan dan berpendidikan rendah, serta memiliki sistem sosial yang rentan; sebagian besar penduduknya berusaha atau bekerja di sektor informal; lingkungan permukiman, rumah, fasilitas dan prasarananya di bawah standar minimal sebagai tempat bermukim, misalnya memiliki: kepadatan penduduk yang tinggi > 200 jiwa/km² ; kepadatan bangunan > 110 bangunan/Ha; kondisi prasarana buruk (jalan, air bersih, sanitasi, drainase, dan persampahan); kondisi fasilitas lingkungan terbatas dan buruk, terbangun dapat atau berpotensi menimbulkan ancaman (fisik dan non fisik) bagi manusia dan lingkungannya.

Penilaian kekumuhan berdasarkan Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh. Penilaian ini menggunakan tujuh kriteria yaitu: (1) kriterian bangunan gedung; (2) jalan lingkungan; (3) penyediaan air bersih dan minum; (4) drainase lingkungan; (5) pengelolaan air limbah; (6) pengelolaan persampahan; dan (7) pengaman kebakaran. Penilaian terhadap masing-masing indikator berdasarkan kondisi di lapangan, kemudian disesuaikan dengan parameter untuk di berikan nilai. Masing-masing parameter mempunyai bobot nilai 5 (76% - 100% sesuai kondisi parameter aktual), 3 (51% - 75% sesuai kondisi parameter aktual) dan 1 (25 % - 50 % sesuai kondisi parameter aktual), yang selanjutnya ditotal untuk menentukan nilai kekumuhan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan adalah sebagai

berikut: (a) kumuh berat bila memiliki nilai total 71-97; (b) kumuh sedang bila memiliki nilai 45-70; (c) kumuh ringan bila memiliki nilai total 19-44.

Akses air minum layak (berkualitas) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah (sirusa BPS). Sedangkan sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu (Sirusa BPS).

2.4 Drainase

Menurut Fariszi,D. (2015) sistem drainase adalah rangkaian kegiatan yang membentuk upaya pengaliran air, baik air permukaan (limpasan/run off), maupun air tanah (underground water) dari suatu daerah atau kawasan. Sistem drainase merupakan bagian penting pada suatu kawasan perumahan. Suatu kawasan perumahan yang tertata dengan baik haruslah juga diikuti dengan penataan sistem drainase yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga tidak menimbulkan genangan air yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan kerugian sosial ekonomi terutama yang menyangkut aspek-aspek kesehatan lingkungan permukiman.

Menurut Suripin, (2004) drainase yang berasal dari bahasa inggris drainage mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Drainase secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan/lahan, sehingga fungsi kawasan/lahan tidak terganggu. Drainase dapat juga di artikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah

dalam kaitannya dengan salinitas. Jadi, drainase menyangkut tidak hanya air permukaan tapi juga air tanah.

Jenis drainase dapat dikelompokkan sebagai berikut Kusumo (2009)

1. Drainase menurut sejarah terbentuknya
 - a. Drainase alamiah (Natural Drainage) drainase yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat bangunan-bangunan penunjang, saluran ini terbentuk oleh gerusan air yang bergerak karena gravitasi yang lambat laun membentuk jalan air yang permanen seperti sungai. Daerah- daerah dengan drainase alamiah yang relatif bagus akan membutuhkan Pelindungan yang lebih sedikit daripada daerah-daerah rendah yang tertindak sebagai kolam penampung bagi aliran dari daerah anak-anak sungai yang luas.
 - b. Drainase buatan drainase yang dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu sehingga memerlukan bangunan-bangunan khusus seperti selokan pasangan batu, gorong-gorong, dan pipa-pipa.
2. Drainase menurut letak bangunannya
 - a. Drainase permukaan tanah (Surface Drainage) saluran drainase yang berada di atas permukaan tanah yang berfungsi untuk mengalirkan air limpasan permukaan. Analisis alirannya merupakan analisis open channel flow (aliran saluran terbuka).
 - b. Drainase bawah permukaan tanah (Subsurface Drainage) saluran drainase yang bertujuan untuk mengalirkan air limpasan permukaan melalui media di bawah permukaan tanah (pipa-pipa) dikarenakan alasan alasan tertentu. Ini karena alasan tuntutan artistik, tuntutan fungsi permukaan tanah yang tidak membolehkan adanya saluran dipermukaan tanah seperti lapangan sepak bola, lapangan terbang, dan taman.
3. Drainase Menurut Konstruksinya

- a. Saluran terbuka saluran yang lebih cocok untuk drainase air hujan yang terletak di daerah yang mempunyai luasan yang cukup, ataupun untuk drainase air non-hujan yang tidak membahayakan kesehatan atau mengganggu lingkungan.
 - b. Saluran tertutup saluran yang pada umumnya sering di pakai untuk aliran air kotor (air yang mengganggu kesehatan atau lingkungan) atau untuk saluran yang terletak di tengah kota.
4. Drainase menurut sistem buangnya pada sistem pengumpulan air buangan sesuai dengan fungsinya maka pemilihan sistem buangan dibedakan menjadi :
- a. Sistem Terpisah (Separate System) Dimana air kotor dan air hujan dilayani oleh sistem saluran masing-masing secara terpisah.
 - b. Sistem Tercampur (Combined system) Dimana air kotor dan air hujan disalurkan melalui satu saluran yang sama.
 - c. Sistem Kombinasi (Pscudo Separate system) Merupakan perpaduan antara saluran air buangan dan saluran air hujan dimana pada waktu musim hujan air buangan dan air hujan tercampur dalam saluran air buangan, sedangkan air hujan berfungsi sebagai pengenceran penggelontor kedua saluran ini tidak bersatu tetapi dihubungkan dengan sistem perpipaaan interceptor.

2.5 Karakteristik Masyarakat

Beberapa karakteristik demografi yang umumnya digunakan dalam penelitian antara lain usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan masa kerja Saruono dan Soeroso, (2011). Berikut penjabaran mengenai karakteristik demografi tersebut :

1. Usia
2. Jenis Kelamin
3. Pendidikan
4. Pekerjaan

5. Status Ekonomi

2.6 Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Permukiman Kumuh

Hariyanto (2008), mengatakan bahwa faktor penyebab munculnya kawasan kumuh (*slum* dan *Squatter*) dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang bersifat langsung dan faktor yang bersifat tidak langsung. Faktor-faktor yang bersifat langsung yang menyebabkan munculnya kawasan kumuh adalah faktor fisik yaitu yang dicirikan dengan kondisi perumahan dan sanitasi lingkungan. Faktor-faktor yang bersifat tidak langsung adalah faktor-faktor yang secara langsung tidak berhubungan dengan kekumuhan, tetapi faktor-faktor yang dinilai berdampak tidak langsung terhadap kekumuhan adalah faktor ekonomi masyarakat, sosial, dan budaya masyarakat. Penyebab munculnya permukiman kumuh adalah sebagai berikut (Sadyohutomo, 2008):

- Pertumbuhan kota yang tinggi, yang tidak diimbangi oleh tingkat pendapatan yang cukup.
- Keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana (terutama jalan) pada daerah perkembangan permukiman baru. Seiring dengan kebutuhan perumahan yang meningkat maka masyarakat secara swadaya memecah bidang tanah dan membangun permukiman tanpa didasari perencanaan tapak (*site plan*) yang memadai. Akibatnya bentuk dan tata letak kaveling tanah menjadi tidak teratur dan tidak dilengkapi prasarana dasar permukiman.

Sedangkan Menurut Rindrojono (2013), Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tumbuhnya di permukiman kumuh di daerah perkotaan, yakni :

1. Faktor Urbanisasi

Urbanisasi adalah substansi pergeseran atau transformasi perubahan corak sosio ekonomi masyarakat perkotaan yang berbasis industri dan jasa-jasa. Proses Urbanisasi ini merupakan suatu gejala umum yang di alami oleh negara-negara yang sedang berkembang dan proses urbanisasi ini berlansung pesat di karenakan daya tarik daerah perkotaan yang sangat kuat, baik yang bersifat aspek ekonomi maupun

yang bersifat non ekonomi. Selain itu, daerah pedesaan yang serba kekurangan merupakan pendorong yang kuat dalam meningkatkan arus urbanisasi ke kota-kota besar.

Kota yang mulai padat penduduk dengan penambahan penduduk tiap tahunnya melampaui penyediaan lapangan pekerjaan yang ada di daerah perkotaan sehingga menambah masalah baru bagi kota. Tekanan ekonomi dan kepadatan penduduk yang tinggi bagi para penduduk yang urbanisasi dari desa, memaksa para urbanisasi ini untuk tinggal di daerah pinggiran sehingga akan terjadinya lingkungan yang kumuh dan menyebabkan banyaknya permukiman liar di daerah pinggiran ini.

2. Faktor Lahan Perkotaan

Lahan di daerah perkotaan semakin hari luas lahannya berkurang akibat pertumbuhan penduduk yang melonjak drastis dari tahun ke tahun, ini merupakan permasalahan yang di hadapi di daerah perkotaan sehingga masalah perumahan di daerah perkotaan merupakan masalah serius yang dihadapi daerah perkotaan. Permasalahan perumahan sering disebabkan karena ketidakseimbangan antara penyediaan unit rumah bagi orang yang berekonomi lemah dan kaum yang tergolong ekonomi mampu di daerah perkotaan. Sehingga banyak masyarakat yang berekonomi lemah hanya mampu tinggal di permukiman yang tidak layak.

3. Faktor Prasarana dan Sarana

Kondisi sarana dan prasarana dasar di permukiman seperti air bersih, jalan, drainase, jaringan sanitasi, listrik, sekolah, pusat pelayanan, ruang terbuka hijau, dan pasar tidak memenuhi standar dan tidak memadai sehingga menyebabkan permukiman tersebut bisa menjadi kumuh.

4. Faktor Sosial dan Ekonomi

Pada umumnya sebagian besar penghuni lingkungan permukiman kumuh mempunyai tingkat pendapatan yang rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang ada. Tingkat pendapatan yang rendah ini yang menyebabkan tingkat daya beli yang rendah pula atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses pelayanan sarana dan prasarana dasar. Selain itu, ketidakmampuan ekonomi bagi

masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah yang layak huni menambah permasalahan permukiman di daerah perkotaan.

6. Faktor tata ruang

Dalam tata ruang permukiman kumuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk struktur ruang kota. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang kota harus didasarkan pada pemahaman bahwa pengembangan kota harus dilakukan sesuai dengan daya dukungnya termasuk daya dukung yang relatif rendah di lingkungan permukiman kumuh. Jika salah pemahaman dan pemanfaatan ruang kota akan menimbulkan dampak yang merusak lingkungan serta berpotensi mendorong tumbuh kembangnya lingkungan permukiman kumuh atau tumbuhnya permukiman kumuh baru di daerah perkotaan, hal tersebut menghapus lingkungan permukiman lama atau kampung-kampung kota yang mempunyai nilai warisan budaya tinggi.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Jurnal	Penulis	Nama Jurnal	Indikator	Variabel	Sub variabel
1	KAJIAN KARAKTERISTIK KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH DI KAMPUNG KOTA (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang)	Raisya Nursyahbani dan Bitta Pigawati	Jurnal Teknik PWK	Karakteristik Penghuni	Jenis Pekerjaan	a) PNS b) Swasta c) Pedagang d) Tidak Bekerja e) Lainnya
					Tingkat Pendidikan	a) Rendah b) Sedang c) Tinggi d) Sangat Tinggi
					Jumlah Penghuni	a) 1 Kepala keluarga b) 2 Kepala keluarga c) 3 Kepala keluarga d) 4 Kepala keluarga
					Pendapatan	a) Rendah b) Sedang c) Tinggi d) Sangat Tinggi
				Karakteristik Hunian	Jenis Bangunan	a) Permanen b) Semi permanen
					Luas Bangunan	a) Sempit b) Sangat Sempit c) Sangat Cukup d) Cukup
					Kepemilikan Lahan	a) Hak Milik b) Milik pemerintah
				Karakteristik Sarana dan Prasaran	Kondisi Jalan	a) Buruk b) Kurang c) Baik

No	Judul Jurnal	Penulis	Nama Jurnal	Indikator	Variabel	Sub variabel
						d) Sangat Baik
					Kondisi Pembuangan Sampah	a) Buruk b) Kurang c) Baik d) Sangat Baik
					Kondisi Drainase	a) Buruk b) Kurang c) Baik d) Sangat Baik
					Kondisi Air Bersih	a) Buruk b) Kurang c) Baik d) Sangat Baik
				Karakteristik Tingkat Kekumuhan	Kualitas Bangunan	a) > 50% non permanen b) 25-50% non permanen c) <25% non permanen
					Prasarana Air Bersih	a) Perpipaan <30% b) Perpipaan 30-60% c) Perpipaan >60%
					Prasarana Sanitasi	a) Sanitasi pribadi <30% b) Sanitasi pribadi 30-70% c) Sanitasi pribadi >70%
					Prasarana Persampahan	a) Pelayanan <50% b) Pelayanan 50-70%

No	Judul Jurnal	Penulis	Nama Jurnal	Indikator	Variabel	Sub variabel
						c) Pelayanan >50%
					Prasarana Drainase	a) Genangan >50% b) Genangan 25-50% c) Genangan <25%
					Kondisi Jalan	a) Jalan buruk >70% b) Jalan buruk 50-70% c) Jalan buruk <50%
					Kepadatan Penduduk	a) >201 jiwa/ha b) 151-200 jiwa/ha c) <150 jiwa/ha
					Ruang Gerak Perjiwa	a) <10 m ² /jiwa b) 10 m ² /jiwa c) >10 m ² /jiwa
					Status Kepemilikan Lahan	a) >66,6% belum bersertifikat b) 33,3-66,6% belum bersertifikat c) <33,3% belum bersertifikat
2	Analisis Karakteristik dan Penilaian Tingan Kekumuhan Kawasan Permukiman Kampung Braga Kota Bandung	Ake Wihadanto, Baba Barus, Noer Azam Acsani, Deddy S. Bratakusumah	<i>Journal of Regional and Rural Development Planing juni 2017,1(2): 132-144</i>	Karakteristik Penghuni	Asal Daerah	a) Penduduk Asli b) Pendatang
					Jenis Pekerjaan	a) PNS b) Swasta c) Pedagang d) Tidak Bekerja e) Lainnya
					Tingkat Pendidikan	a) SD b) SMP c) SMA

No	Judul Jurnal	Penulis	Nama Jurnal	Indikator	Variabel	Sub variabel
						d) D1 e) D3 f) S1 g) S2 h) S3
				Karakteristik hunian	Luas lahan	a) >36 m ² b) >45 m ² c) Lainnya
			Jumlah KK		a) 1 Kepala Keluarga b) 2 Kepala Keluarga c) 3 Kepala Keluarga d) 4 Kepala Keluarga e) Lainnya	
			Status Kepemilikan		a) Milik Sendiri b) Milik Pemerintah c) Sewa	
				Karakteristik Sarana dan Prasarana	Jalan	a) Sangat Luas b) Luas c) Cukup d) Sempit e) Sangat Sempit
			Air Bersih		a) Buruk b) Kurang c) Baik d) Sangat Baik	
			Pembuangan Limbah		a) Buruk b) Kurang c) Baik d) Sangat Baik	
			Drainase		a) Buruk b) Kurang c) Baik d) Sangat Baik	

No	Judul Jurnal	Penulis	Nama Jurnal	Indikator	Variabel	Sub variabel
					Pengelolaan Sampah	a) Buruk b) Kurang c) Baik d) Sangat Baik
				Karakteristik Spasial	Penggunaan lahan sekitar	a) Jumlah Permukiman Teratur b) Jumlah Permukiman tidak Teratur c) Jumlah Persil Bangunan di sepadan Sungai Cikapundung d) Tanah kosong luas ruang terbuka non hijau dan ruang terbuka hijau
3.	Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat	Niken Fitria dan Rulli Pratiwi Setiawan Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)	Aspek Sarana dan Prasarana	Air Bersih	a) Sangat rendah b) Cukup baik c) Baik d) Sangat baik
					Aksesibilitas	a) Sangat rendah b) Cukup baik c) Baik d) Sangat baik
					Persampahan	a) Sangat rendah b) Cukup baik c) Baik d) Sangat baik
					Sanitasi	a) Sangat rendah b) Cukup baik c) Baik d) Sangat baik
					Drainase	a) Sangat rendah b) Cukup baik c) Baik

No	Judul Jurnal	Penulis	Nama Jurnal	Indikator	Variabel	Sub variabel
						d) Sangat baik
				Aspek Fisik	Kondisi Bangunan	a) Permanen b) Semi permanen
				Aspek Sosial	Asal Daerah	a) Pendatang b) Penduduk asli
					Tingkat Pendidikan	a) SD b) SMP c) SMA d) Perguruan tinggi
					Tingkat Kekerabatan	a) Sangat rendah b) Rendah c) Baik d) Sangat baik
				Aspek Ekonomi	Pendapatan	a) Rp 1.000.000-1.500.000 b) 1.600.000-2.000.000 c) Rp. 2.100.000-2.500.000 d) Rp >2.500.000
				Aspek Bahaya	Kondisi Banjir	a) Sangat rendah b) Rendah c) Berat d) Sangat Berat
4	Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus:	Bani Putri Yulianti, M.Balquni, Su	JURNAL GEOGRAFI UGM Vol. 29,	Sebelum program peremajaan dan penataan kawasan	Ketersediaan air bersih	a) Sangat baik b) Baik c) Cukup baik

No	Judul Jurnal	Penulis	Nama Jurnal	Indikator	Variabel	Sub variabel
	Program Peremajaan Kawasan TegalPanggung Di Kota Yogyakarta)	Ritohardoyo, Hadi Sabari Yunus' dan Bakti Setiawan.	No. 1, (2015) ISSN: 0215-1790			d) Buruk e) Sangat Buruk
					Kondisi sanitadi dan MCK	a) Sangat baik b) Baik c) Cukup baik d) Buruk e) Sangat Buruk
					Kondisi prasarana jaringan jalan	a) Sangat baik b) Baik c) Cukup baik d) Buruk e) Sangat Buruk
					Kondisi SPAH dan drainase	a) Sangat baik b) Baik c) Cukup baik d) Buruk e) Sangat Buruk
					Ketersediaan <i>open space</i> dan taman	a) Sangat baik b) Baik c) Cukup baik d) Buruk e) Sangat Buruk
					Pelaksanaan program	a) Pembuatan rumah susun graha bina harapan b) Saluran drainase dan SPAH c) Sanitasi d) Ruang terbuka hijau e) Pelaberan jalan lingkungan

No	Judul Jurnal	Penulis	Nama Jurnal	Indikator	Variabel	Sub variabel
				Sesudah program peremejaan dan penataan kawasan	Ketersediaan air bersih	a) Sangat baik b) Baik c) Cukup baik d) Buruk e) Sangat Buruk
					Kondisi sanitadi dan MCK	a) Sangat baik b) Baik c) Cukup baik d) Buruk e) Sangat Buruk
					Kondisi prasarana jaringan jalan	a) Sangat baik b) Baik c) Cukup baik d) Buruk e) Sangat Buruk
					Kondisi SPAH dan drainase	a) Sangat baik b) Baik c) Cukup baik d) Buruk e) Sangat Buruk
					Ketersediaan <i>open space</i> dan taman	a) Sangat baik b) Baik c) Cukup baik d) Buruk e) Sangat Buruk
					Pelaksanaan program	a) Pembuatan rumah susun graha bina harapan b) Saluran drainase dan SPAH c) Sanitasi

No	Judul Jurnal	Penulis	Nama Jurnal	Indikator	Variabel	Sub variabel
						d) Ruang terbuka hijau e) Pelaberan jalan lingkungan

